

Meluruskan konseptual politik identitas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Tegar Hibatullah ^{a,1}, Nasiwan ^{b,2}

¹ (muhammadtegar.2019@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, FISHIPOL, UNY

² (nasiwan@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meluruskan konseptual identitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah *purposive*. Informan penelitian terdiri dari kepala badan sebagai *key* informan, kepala bidang ideologi dan kewaspadaan nasional beserta kepala bidang politik dalam negeri sebagai informan utama, terakhir adalah staf bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, dan staf bidang politik dalam negeri sebagai informan pendukung. Pengambilan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif, yaitu melalui proses reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meluruskan konseptual identitas adalah melalui (1) Pendidikan politik, (2) Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan (3) Sinau Bhinneka Tunggal Ika.

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the role of the National Unity and Political Agency for the Special Region of Yogyakarta in straightening out conceptual identity. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The technique used to determine research informants is purposive. The research informants consisted of the head of the agency as key informants, the head of ideology and national vigilance along with the head of domestic politics as the main informants, finally the staff in the field of ideology and national vigilance, and the staff in the field of domestic politics as supporting informants. Data collection was carried out through in-depth interviews and documentation with data validity techniques using data source triangulation. The data analysis technique used in this research is inductive data analysis, namely through the process of data reduction, data categorization, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the role of the Yogyakarta Special Region National and Political Unity Agency in straightening out conceptual identity is through (1) Political education, (2) Study of Pancasila and National Vision, and (3) Study of Bhinneka Tunggal Ika.

Sejarah Artikel

Diterima : 29 Januari 2024

Disetujui: 29 Januari 2024

Kata Kunci:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemilu 2024, politik identitas.

Keywords:

National Unity and Politics Agency, 2024 election, identity politics.

Pendahuluan

Secara konseptual, politik identitas kini mengalami deviasi. Deviasi yang dimaksud adalah hanya dipahami terbatas pada domain agama saja dan melekatnya karakterisasi negatif terhadap konseptual politik identitas. Deviasi terhadap konseptual politik identitas terjadi karena pengalaman kepemiluan di Indonesia dalam kurung waktu 7 (tujuh) tahun silam terutama dipantik oleh memanasnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Panasnya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 disebabkan karena eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memperoleh

status *inkracht van gewijsde* atas kasus penodaan agama olehnya. Kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok kemudian memicu kemarahan terkhusus bagi masyarakat beragama Islam dengan mengekspresikannya melalui aksi secara berjilid-jilid dengan kulminasi gerakan pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan aksi 212.

Aksi 212 tidak hanya mewarnai kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 saja, tetapi berimplikasi pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019 dengan membentuk aksi reuni 212. Politik dengan mengenakan identitas Islam (politik identitas) pada Pilpres 2019 semakin terlihat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapitera Ampera sebagai anggota advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI "*politik umat Islam dan umat Islam sekarang mempunyai keinginan untuk berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional yaitu seperti melalui Pemilu, Pilkada, dan Pilpres*" (Subarkah, 2019).

Pada tanggal 27 juli 2018, aksi 212 melakukan Ijtima ulama yang menghasilkan keputusan bersifat politis berupa dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai salah satu calon presiden (Capres) yang akan maju dalam kontestasi Pemilu tahun 2019. Keputusan atau hasil konsensus (ijtima) ulama tersebut tentu saja dapat menguntungkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan konstelasi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan bertendensi mengikuti pilihan ulama atau pemuka agama. Masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa ulama atau pemuka agama merupakan figur yang patut dijadikan contoh dalam memilih seorang pemimpin (Subarkah, 2019).

Berangkat dari kasus eks gubernur Ahok dan ijtima ulama yang memberikan dukungan kepada Capres Prabowo Subianto, ternyata telah memberikan sentimen kuat terhadap identitas agama yang selalu dikenakan oleh para politisi untuk menarasikan bahwa pemerintah selama ini berlaku tidak adil karena telah memarginalkan kelompok agama Islam. Misalnya saja seperti narasi yang dikeluarkan oleh politisi Amien Rais yaitu adanya kelompok pendukung partai Allah dan partai setan (Ardipandanto, 2020). Narasi tersebut tentu saja mengakibatkan polarisasi politik yang begitu kuat baik di kalangan elite maupun masyarakat. Terbukti bahwa pada Pilpres 2019 terdapat polarisasi yang begitu kuat dengan memberikan stigma bahwa Prabowo Subianto sebagai Capres Islami atau pro terhadap Islam dan Jokowi sebagai Capres yang tidak Islami atau tidak pro terhadap Islam. Menurut Kiftiyah (2019) Prabowo Subianto juga diisukan sebagai sosok yang otoriter karena pengalaman militernya dan dekat dengan keluarga Presiden Soeharto, hal yang paling dikhawatirkan adalah apabila Prabowo terpilih akan terulang kembali pemerintahan Indonesia yang otoriter seperti masa orde baru. Selain itu, isu mengenai Prabowo berasal dari keluarga Nasrani juga tak luput dihembuskan ke permukaan.

Ardipandanto (2020) mengemukakan tentang stigma Jokowi sebagai sosok yang tidak pro terhadap Islam dilatarbelakangi oleh isu-isu tentang kriminalisasi ulama, penangkapan aktivis Islam, dan lain sebagainya. Meskipun Jokowi telah menggandeng salah satu tokoh ulama konservatif yaitu Ma'ruf Amien, realitasnya dibeberapa daerah seperti Sumatera Barat misalnya, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf terlampau sangat rendah apabila dikomparasikan dengan Prabowo-Sandi. Hal ini dikarenakan isu-isu berbasis keagamaan sudah terbangun dalam masyarakat selama masa kampanye Pemilu 2019. Apalagi potret masyarakat Indonesia termasuk Sumatera Barat masih bersifat sosiologis dan emosional dalam menjadikan agama sebagai instrumen utama dalam menentukan preferensi politiknya.

Akibat dari kerasnya pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019 yang selalu mengkapitalisasi isu-isu berbasis agama dan membuat masyarakat terpolarisasi. Akhirnya membuat cara pandang seluruh elemen masyarakat terhadap konseptual politik

identitas menjadi sempit dan negatif. Padahal apabila merujuk pendapat para ahli yang mafhum tentang politik identitas, maka cara pandang yang diamini oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah sebuah kesalahan. Kesalahan dalam memahami konseptual politik identitas menjadi sebuah urgensi untuk segera diluruskan, agar pemahaman dan pembahasan yang dilakukan tidak sekedar bersifat politis, tetapi benar sesuai dengan koridor akademis.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif tersebut untuk menentukan serta mencari, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif karena data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang mengilustrasikan atau menggambarkan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat sesuai dengan realitas, dan dilakukan oleh suatu lembaga. Lembaga yang dimaksud guna pengambilan data adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perannya meluruskan konseptual politik identitas.

Komposisi dari subjek atau informan penelitian dalam penelitian ini meliputi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY (informan kunci/*key informan*), Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional beserta Kepala Bidang Politik dalam Negeri (informan utama), dan satu Staf Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, serta satu Staf Bidang Politik dalam Negeri (informan pendukung).

Pengambilan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek perolehan data dari beberapa sumber yang sudah dikategorikan. Dengan demikian, peneliti telah mengategorikan tiga sumber data, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai informan kunci (*key informan*), Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional serta Kepala Bidang Politik dalam Negeri sebagai informan utama, dan terakhir adalah Staff Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagai informan pendukung beserta Staff Bidang Politik dalam Negeri. Setelahnya, peneliti mendeskripsikan dan mengategorikan terlebih dahulu berdasarkan pada pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik dari sumber-sumber data yang telah ada.

Hasil dan Pembahasan

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meluruskan konseptual politik identitas adalah dengan cara menggerakkan tiga program utama dari dua bidang yang berbeda, yaitu: (1) Pendidikan politik sebagai bagian dari program Bidang Politik dalam Negeri; (2) Sinau Pancasila dan wawasan kebangsaan, beserta (3) Sinau Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian dari program Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional. Dalam penyajian pembahasan nantinya, program Sinau Bhinneka Tunggal Ika akan digabung bersamaan dengan program Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini dilakukan karena kedua program tersebut memiliki irisan atau keterkaitan satu sama lain. Berikut pembahasan dari program-program tersebut secara komprehensif.

1. Pendidikan politik

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama oleh Bidang Politik dalam Negeri menysasar berbagai elemen masyarakat seperti generasi z yang tergolong sebagai pemilih pemula dengan rentang usia 17-23 tahun,

generasi millennial dengan rentang usia 24-39, kaum perempuan terutama sebagai calon legislatif yang mendapatkan kuota 30%, dan para kaum difabel. Keseluruhan elemen masyarakat tersebut tersintesis ke dalam 4 golongan fasilitasi pendidikan politik, yaitu: (1) partai politik; (2) organisasi masyarakat; (3) Lembaga nirlaba seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Dharma Wanita, Karang Taruna, dll; dan (4) Lembaga atau institusi vertikal pada tingkat daerah.

Dalam menyelenggarakan pendidikan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki metode yang berbeda-beda. Metode yang digunakan misalnya saja dengan *outbond*, penyelenggaraan kegiatan di lingkungan formal maupun non-formal seperti di *caffe* atau resto. Berbagai macam inovasi tersebut sengaja dihadirkan supaya program yang dijalankan tidak terkesan monoton dan pada akhirnya akan membuat para audiens mengantuk ketika sedang mendengarkan pemateri yang sedang berbicara. Sedangkan untuk kelompok difabel memiliki metode ataupun treatment yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misalnya saja terdapat kelompok tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok tersebut pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pengelompokan ini adalah supaya dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap kelompok difabel tersebut dalam kontestasi Pemilu nantinya.

Implementasi program pendidikan politik oleh Bidang Politik dalam Negeri selalu mengutamakan kerja sama dengan narasumber dari pelbagai lembaga atau institusi lain seperti, organisasi masyarakat, akademisi pemerhati politik, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Program pendidikan politik selain diberikan secara interaktif-langsung dengan menghadirkan para narasumber, juga dikemas dengan pembuatan konten-konten berbasis video digital seperti animasi, iklan layanan masyarakat, dan film pendek yang kemudian diupload di kanal media sosial milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta supaya dapat diakses oleh khalayak luas.

2. Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki kesadaran akan pentingnya revitalisasi Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi tersebut dilakukan sejak tahun 2017 dengan mencanangkan program sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara. Selain diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, program ini juga diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta melalui beberapa metode seperti seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Revitalisasi Ideologi Pancasila melalui program sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin dimantapkan dengan hadirnya yuridis formal, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Paryanto, Wance, Hadi, & La Suhu, 2022).

Program Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara spesifik dijalankan oleh salah satu bidang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional. Program Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menysasar di seluruh 78 kecamatan/kemantren yang tersebar pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Paryanto, dkk. (2022) materi yang disuguhkan dalam Program Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setidaknya meliputi tiga aspek, yaitu

Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal. Aspek Pancasila, di dalamnya terdiri dari materi sejarah lahirnya Pancasila, Sejarah Indonesia, pancasila dasar negara, Pancasila pemersatu bangsa, dan aktualisasi Pancasila. Kemudian aspek Wawasan Kebangsaan, meliputi materi Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan aktualisasi Wawasan kebangsaan. Sedangkan untuk muatan lokal memiliki materi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, lagu nasional maupun daerah.

Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dalam implementasinya baik melalui program Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maupun Sinau Bhinneka Tunggal Ika, selalu melibatkan pihak-pihak eksternal terutama sebagai narasumber atau pemateri. Narasumber tersebut biasanya berasal dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Akademisi pada bidang ke-Pancasilaan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai menghadirkan pimpinan Teroris se-Asia Tenggara. Selayaknya program Pendidikan Politik, Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta Sinau Bhinneka Tunggal Ika, diselenggarakan secara interaktif-langsung dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara membuat konten berbasis video digital seperti animasi, iklan layanan masyarakat, dan film-film pendek yang kemudian diupload di kanal media sosial milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setiap program yang dihadirkan oleh Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional selalu menggelorakan narasi “bahwa apapun yang terjadi pada Bangsa Indonesia ini, kita tetap harus memegang teguh prinsip satu nusa satu bangsa”. Bidang Bina Ideologi juga memiliki tagline tersendiri, yaitu “bermartabat merayakan keberagaman”. Keberagaman sebagai bagian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa, keberagaman tersebut meliputi suku, agama, ras, budaya, pemikiran, bermusik, berpakaian, bermakanan, dan keberagaman lainnya yang harus dijunjung tinggi dan dibalut dengan semangat persatuan dan kesatuan selama tidak bertentangan dengan kaidah nilai-nilai Pancasila. Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maupun Sinau Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah formula efektif untuk memberikan edukasi dan alternatif solusi terhadap pelbagai persoalan kebangsaan.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum maupun secara khusus dalam meluruskan konseptual politik identitas baik melalui program Pendidikan Politik, sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maupun sinau Bhinneka Tunggal Ika adalah selalu memberikan edukasi atau penjelasan kepada berbagai elemen masyarakat bahwa pada dasarnya konsep politik identitas jangan sampai dimaknai secara sempit dalam artian terbatas pada domain agama dan hanya berkonotasikan negatif saja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kemudian menjelaskan bahwa politik identitas secara konseptual merupakan instrumen politik bagi setiap orang yang didasarkan atas identitas-identitas tertentu, misalnya berdasarkan suku, ras, agama, budaya, daerah, gender, dan masih banyak lagi.

Validasi dari apa yang dikemukakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai basic concept politik identitas dapat ditinjau melalui penjelasan Widjaja, dkk. (2021), politik identitas dalam terminologi luas dapat dipahami sebagai penggunaan kesamaan identitas yang mencakup suku, ras, asal daerah, gender, agama, bahasa, kelas sosial, dan identitas lainnya. Dari apa yang dikemukakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus di afirmasi dengan penjelasan Widjaja telah mengindikasikan dan memberikan klarifikasi secara konkret

bahwa konsep politik identitas yang selama ini dimaknai hanya terbatas pada domain agama saja oleh khalayak luas merupakan kesalahan.

Penjelasan selanjutnya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berkaitan dengan penggunaan politik identitas. Politik identitas secara konseptual digunakan sebagai salah satu instrumen politik dalam memperjuangkan keadilan bagi suatu kelompok masyarakat termarginalkan dalam seluruh aspek kehidupan sosio-politiknya. Marginalisasi di sini dapat diinterpretasikan sebagai aspirasi masyarakat yang selama ini kurang didengar atau oleh negara dianggap sebagai *second citizen*. Diakses melalui Dictionary.com dan merriem-webster.com, *second citizen* atau warga negara kelas dua merupakan orang yang secara sistematis mengalami diskriminasi pada sebuah yurisdiksi politik negara. Diskriminasi yang dilakukan oleh negara adalah dalam bentuk hak hukum, hak sipil, dan kesempatan ekonomi yang bersifat paroki. Warga negara kelas dua ini juga sering kali menjadi bahan perundungan oleh masyarakat mayoritas.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Alfaqi (2016), politik identitas adalah instrumen politik bagi kelompok etnis, suku, agama, atau identitas-identitas lainnya dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang dialami kelompok tertentu. Politik identitas juga dapat dikatakan sebagai instrumen untuk menunjukkan eksistensi kelompok.

Relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh alfaqi terletak pada kalimat “memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang termarginalkan”. Individu atau kelompok yang mengalami marginalisasi merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan. Kemudian *causa* dari marginalisasi adalah adanya perilaku diskriminatif. Esensi dari diskriminasi adalah tendensi manusia untuk mendiferensiasi individu atau kelompok berdasarkan pada aspek tertentu misalnya, suku, ras, agama, daerah, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, perilaku diskriminatif akan membuat individu atau kelompok sosial tertentu memiliki ruang gerak yang terbatas dan akan mengalami marginalisasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Pattigrew dalam Liliwari (2018) bahwa terdapat dua tipologi diskriminasi, yaitu: (1) Diskriminasi langsung, adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti jenis pekerjaan, fasilitas umum, pemukiman, dan fasilitas umum bagi suatu ras atau etnik tertentu. (2) Diskriminasi tidak langsung, adalah diskriminasi yang dilakukan melalui kebijakan negara untuk menghalangi ras atau etnik tertentu dalam menjalankan fungsi sosialnya. Sehingga diskriminasi dan marginalisasi dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut terletak pada suatu kondisi dimana individu atau kelompok terbatas dalam mengakses hak sipil dan politiknya secara bebas. Sedangkan relevansi antara keadilan dan kebebasan dapat diperkuat menggunakan teori dari Rawls.

Rawls (1973) memberikan penjelasan terkait dengan dua prinsip keadilan, yaitu: (1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk ikut serta dalam kehidupan politik (memberikan suara dan atau mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu), kebebasan berbicara, berkeyakinan, menjadi diri sendiri, dan hak mempertahankan hak milik pribadi. (2) Terdiri dari dua segmen, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Rawls kemudian menegaskan adanya prioritas pada masing-masing prinsip bilamana satu dengan yang lainnya terdapat kontradiksi. Jika terdapat kontradiksi maka prinsip yang harus diutamakan atau ditempatkan pada posisi paling tinggi adalah prinsip pertama mengenai kebebasan. Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati oleh

prinsip kedua segmen kedua, yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Pada posisi paling bawah ditempati oleh prinsip kedua segmen pertama, yaitu prinsip perbedaan. Maka, untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan haruslah mampu untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak fundamental sebagai nilai tertinggi. Setelahnya diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Terakhir, adanya pembedaan tertentu berdasarkan kondisi sosio-ekonomi juga akseptabel sepanjang membawa utilitas bagi orang-orang yang kurang atau tidak beruntung.

Penjelasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara langsung juga memiliki relasi kuat terhadap teori yang dikemukakan oleh Heller. Politik identitas merupakan gerakan yang mempunyai fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai kategori utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*) kemudian muncul ide mengenai perbedaan yang menjanjikan adanya kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*). Politik identitas erat kaitannya dengan instrumen perjuangan bagi kelompok termarginalkan sebagai akibat dari hegemoni kelompok yang lebih kuat (Heller & Punsher, 1995). Jadi, politik identitas juga digunakan untuk memperoleh kebebasan dari yang sebelumnya terbelenggu (dibatasi) sebagai akibat dari adanya ketidakadilan, diskriminasi, atau marginalisasi. Kemudian di dalam teori heller terdapat diksi “toleransi”, dimana toleransi ini harus ditekankan dalam politik identitas untuk mereduksi bahkan mencabut perilaku diskriminatif dari akarnya sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tidak adil.

Penggunaan politik identitas dalam pemilu saat ini tengah mengalami kebuntuan dikarenakan pemaknaan berbagai elemen masyarakat terhadap konsep politik identitas yang dianggapnya sebagai hal negatif. Implikasinya adalah politik identitas diharamkan untuk digunakan sebagai instrumen oleh setiap partai politik maupun calon dalam kontestasi Pemilu tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perannya meluruskan konseptual politik identitas kepada masyarakat perihal penggunaannya yang tidak diperbolehkan pada kontestasi Pemilu adalah dengan memberikan penjelasan dimana dalam konstelasi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, penggunaan politik identitas dalam khasanah perpolitikan bangsa salah satunya digunakan ketika kontestasi Pemilu merupakan hal wajar dan tidak problematis. Bahkan apabila melihat realitas politik yang terjadi era ini, dapat dikatakan bahwa semua bentuk politik yang ada di dunia adalah manifestasi dari politik identitas. Di Indonesia sendiri memang tidak bisa menegasikan eksistensi dari politik identitas dan eksistensinya pun mudah untuk diidentifikasi. Pada tanggal 3 Juli 2023 terdapat artikel berita dengan judul “Gandung: Songsong Kemenangan Pemilu 2024 dengan semangat Soeharto”. Nampak sangat terang dari judul berita tersebut dapat teridentifikasi sebagai politik identitas. Lalu timbul sebuah pertanyaan “atas dasar apa salah satu partai tersebut teridentifikasi politik identitas?”, dasar identifikasinya adalah di dalam judul berita terdapat diksi “Soeharto”. Apabila sebuah diksi diikuti dengan sufiks “is” atau “isme” maka telah mengindikasikan bahwa partai politik tersebut sedang menggunakan paham, kepercayaan, atau ajaran “Soeharto”. Paham “Soeharto” yang dianut oleh salah satu partai, sekaligus telah menunjukkan penguasaan identitas “Soeharto”.

Politik identitas dalam konteks ke Indonesiaan lainnya juga dapat ditunjukkan melalui partai politik yang berideologikan Agama Islam dan Nasionalis, kemudian terdapat partai yang menggunakan branding sebagai partainya anak muda, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika menjelang Pemilu yaitu pada saat kampanye politik, para calon kontestasi Pemilu biasanya menggunakan foto dengan mengenakan pakaian-pakaian yang berbau agama seperti peci, baju koko, dan sarung. Jadi apa yang didalilkan pada penjelasan di atas memang betul, pada

dasarnya keseluruhan politik baik yang ada di Indonesia maupun belahan dunia lainnya merupakan manifestasi dari politik identitas.

Pernyataan di atas diperkuat melalui pendapat Parker (2005), yakni setiap politik yang ada di dunia adalah politik identitas "*all politics is identity politics*". Politik merupakan konfigurasi upaya perumusan tentang siapa kita atau kita ingin menjadi apa "*Politics is a form of effort to formulate about who we are or what we want to be*". Pilihan ini didorong oleh imajinasi yang terdapat di dalam diri yang seringkali tidak terlihat di permukaan. Ini dikarenakan imajinasi merupakan suatu cara konstruksi atau presentasi diri. Pada konteks politik, setiap individu pasti akan berusaha untuk membuat komparasi dan opsi di antara nilai-nilai dan kepentingan yang dimiliki. Preferensi untuk menentukan pilihan dan komitmen yang telah dibuat inilah kemudian akan menjadi identitas diri.

Pada hakikatnya, politik identitas merupakan konsep yang positif, mengingat secara historis digunakan sebagai instrumen perjuangan bagi masyarakat sebagai korban atas ketidakadilan atau termarginalisasi. Hakikat dari politik identitas itu sendiri dapat dilihat melalui aspek geneologis. Geneologis dari politik identitas dimulai pada gerakan mahasiswa anti kekerasan atau yang biasa dikenal dengan SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*) di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai gerakan hak-hak sipil. Secara substantif, politik identitas memiliki relasi dengan kepentingan anggota kelompok sosial yang merasa diperas atau termarginalisasi oleh dominasi besar dalam sebuah negara-bangsa. Berangkat dari peristiwa itulah ide tentang keadilan untuk semua menjadi relevan. Para penggagas teori politik identitas di Amerika Serikat memiliki dalil bahwa praktik pemerasaanlah yang mengkonstruksi kesadaran golongan yang diperas khususnya bagi masyarakat berbahasa Spanyol, kulit hitam, dan etnis lainnya yang merasa kelompoknya termarginalisasi oleh kapitalisme yang telah berpihak kepada masyarakat pemilik modal dan pada umumnya dikuasai oleh ras berkulit putih (Kauffman, 1990).

Penjelasan dalam rangka menelusuri politik identitas secara geneologis setidaknya telah memberikan proyeksi kepada masyarakat Indonesia bahwa pada hakikatnya politik identitas merupakan sebuah gerakan yang dapat dinilai secara positif, karena politik identitas digunakan sebagai instrumen untuk membebaskan kelompok masyarakat tertentu dari perlakuan tidak adil dan menginginkan adanya prinsip kesetaraan. Masyarakat yang memperoleh perlakuan tidak adil, baik melalui diskriminasi sampai marginalisasi merupakan bentuk perilaku merendahkan *dignity* manusia. Maka gerakan politik identitas ini hadir dan diarahkan untuk mengangkat *dignity* manusia yang selama ini direndahkan dalam bentuk ketidakadilan diberbagai aspek kehidupan.

Penilaian positif atas konsep politik identitas juga diafirmasi oleh Ahmad Syafii Maarif atau yang biasa dipanggil Buya Syafii dalam bukunya yang berjudul "*Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*". Dalam bukunya, Buya Syafii menjelaskan terkait politik identitas yang harus dinilai sebagai sesuatu yang positif dan bahkan sebagai keharusan sejarah. Pendapat buya didasarkan pada dinamika sosial dan politik di penjuru dunia yang selalu dihiasi oleh politik identitas. Karenanya politik identitas ini telah menjadi bagian dan inheren dari proses sejarah kehidupan sosio-politik umat manusia. Politik identitas tentu saja memiliki fungsi yang penting, karena dipergunakan sebagai gerakan kelompok identitas tertentu untuk memperjuangkan keadilan. Contoh konkret di Indonesia sendiri adalah adanya tuntutan kawasan di luar Jawa seperti Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan Organisasi Papua Merdeka yang menuntut agar tercipta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat

dari pemerintahan yang pada waktu itu terlalu sentralistik atau hanya memprioritaskan pembangunan di wilayah Jawa “Jawa Sentris”. Gerakan-gerakan kedaerahan tersebut dapat dikategorisasi sebagai bagian dari politik identitas yang logis eksistensinya dan harus didengar oleh pemerintah pusat.

Penjelasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dan diperkuat melalui pendapat ahli mengenai konseptual politik identitas telah memberikan titik terang sekaligus mengklarifikasi bahwa penyempitan makna terhadap konseptual politik identitas yang selama ini selalu dinilai negatif serta hanya terbatas pada domain agama saja adalah wujud pemahaman keliru. Ketidappahaman berbagai elemen masyarakat atas konseptual politik identitas sebetulnya dapat dipahami dalam dua kemungkinan. Pertama, memang berbagai elemen masyarakat secara organik atau alamiah tidak paham terhadap konsep politik identitas. Kedua, terdapat politisasi terhadap makna atau konsep politik identitas yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan tujuan menyudutkan lawan politik dalam kontestasi terutama Pemilu tahun 2024.

Merespon dua kemungkinan yang ada, inti jawaban dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah di dalam politik semua kemungkinan bisa saja terjadi. Dari keseluruhan inti jawaban, terdapat dua jawaban yang sangat menarik bagi peneliti, yaitu jawaban dari informan ketiga dan kelima. Penjelasan jawaban dari informan ketiga adalah memang terdapat semacam pola untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024 dengan cara mempolitisasi konseptual politik identitas. Sedangkan informan penelitian ketiga memberikan jawaban dimana terdapat kecenderungan untuk melakukan framing negatif dan sempit terhadap konseptual politik identitas. Melihat keseluruhan jawaban terutama penjelasan jawaban dari informan ketiga dan kelima, memang terdapat probabilitas untuk mempolitisasi konseptual politik identitas. Hal ini dikarenakan di dalam politik semua kemungkinan dapat terjadi.

Ungkapan “di dalam politik semua kemungkinan dapat terjadi” yang telah dilontarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah relevan dengan pemikiran Otto von Bismarck “*politics is the art of the possible*”. Buah pemikiran kanselir pertama Kekaisaran Jerman pada abad ke-19 itu menyiratkan sebuah makna, yakni dalam politik segala rupa dapat terjadi. Artinya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi dan begitupula sebaliknya. Salah satu contohnya adalah bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah yang diambil oleh Prabowo sangatlah unpredictable, karena pada saat kontestasi Pemilu dua kali berturut-turut saja, terjadi rivalitas antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan rivalitas Prabowo dengan Presiden Joko Widodo sampai mengakibatkan polarisasi politik di tingkat massa yang begitu terasa hingga saat ini. Terbukti istilah “cebong” dan “kampret” masih sering dijumpai di kolom komentar, postingan media sosial, bahkan kehidupan nyata sekaligus. Sehingga, asumsi atas probabilitas untuk mempolitisasi konseptual politik identitas bisa saja bahkan sangat mungkin terjadi. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai wacana politik.

“Wacana” pertama kali dipopulerkan oleh Harris pada tahun 1951 dengan memperkenalkan istilah “*discourse analysis*” (Schiffirin, 1994). Wacana adalah satuan bahasa tertinggi dalam linguistik. Wacana juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengungkapan pikiran dan gagasan yang berkembang di masyarakat berupa lisan maupun tulisan. Dengan demikian, wacana politik dapat diartikan kurang lebih sebagai bentuk pengungkapan pikiran dan gagasan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat berupa lisan maupun tulisan dan bermuatan politis. Untuk melakukan analisis wacana politik, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari tujuan

dan fungsi bahasa. Didukung dengan pendapat Fasold (1990), kajian wacana merupakan kajian tentang keragaman aspek penggunaan bahasa. Pendapat yang sama dan lebih spesifik dikemukakan oleh Brown & Yule (1996) bahwa analisis wacana merupakan analisis atas bahasa yang digunakan. Bahasa dalam konteks wacana politik adalah bahasa politik.

Bahasa politik merupakan bahasa hegemoni. Istilah hegemoni pertama kali dituturkan oleh Antonio Gramsci ketika dirinya mendekam di jeruji penjara Prancis. Hegemoni dipergunakan oleh kelas dominan terutama penguasa untuk mengatur masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual. Bahasa saat ini telah direkayasa sedemikian rupa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok dominan (para penguasa) untuk mengonsolidasikan kekuasaan yang diperolehnya. Herbert Marcuse dalam Nasution (2007) juga mengatakan hal serupa, dimana perkembangan bahasa kini sudah dibatasi pengertian-pengertian atau istilahnya dan diabadikan demi kepentingan penguasa dan pengusaha.

Pabottinggi (1991) dan Thomas & Shan (1999) memiliki pandangan yang sama, bahwasannya bahasa bukan semata-mata sebagai instrumen komunikasi penguasa kepada rakyatnya, tetapi juga merupakan sarana strategis untuk berkuasa. Bahasa adalah ekspresi kekuasaan, bilamana praksis bahasa menentukan bagaimana individu atau kelompok masyarakat tertentu didikte dalam berbahasa. Merujuk Pabottinggi dalam Latif (1996), memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas sebuah kata, dan bahkan memilih dialek tertentu, maka tak lain dan tak bukan adalah berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas.

Konsolidasi kekuasaan melalui praksis berbahasa Indonesia dapat dilakukan melalui 6 (enam) cara (Rahardjo 2004). *Pertama*, menghaluskan (eufemisme) konsep dan pengertian yang bersentuhan secara langsung dengan kekuasaan. Eufemisme merupakan upaya untuk mensterilisasi konsep dan pengertian yang dapat membahayakan kedudukan kekuasaan setiap rezim atau kelompok dominan dan agar tercipta iklim positif di terhadapnya. *Kedua*, melakukan pengasaran konsep dan pengertian yang bersentuhan secara langsung dengan kekuasaan. Pengasaran konsep dan pengertian dilakukan dengan tujuan untuk menangkal dan menyudutkan kekuatan lain yang dapat mengancam setiap rezim yang tengah berkuasa ataupun hegemoni dari kelompok dominan pada umumnya, kini dan selanjutnya. Beberapa contoh pengasaran konsep dan pengertian yang pernah dilakukan adalah seperti SARA, subversif, Komunisme, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan yang paling kontemporer adalah politik identitas. Relevan dengan penjelasan sebelumnya, politik identitas sejatinya merupakan konsep positif dalam demokrasi dan tidak terbatas pada domain agama saja. Tetapi saat ini telah dipeyorasikan sedemikian rupa dan mengakibatkan konseptual politik identitas menjadi sesuatu hal yang negatif dan sempit. Apabila politik identitas dilekatkan pada individu atau kelompok tertentu, maka akan membawa dampak yang luar biasa. Dampak luar biasa yang dimaksud adalah ketika terjadi sirkulasi kekuasaan melalui kontestasi politik, maka individu-individu atau kelompok-kelompok ini akan mengalami kekalahan. Kekalahan dalam kontestasi politik dapat terjadi karena individu atau kelompok tertentu akan langsung dijustifikasi oleh penguasa atau kelompok dominan misalnya saja sebagai individu atau kelompok yang intoleran atau pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Cara kedua inilah yang tendensi digunakan oleh penguasa atau kelompok dominan saat ini mengenai politisasi terhadap konseptual politik identitas.

Ketiga, memproduksi konsep dan pengertian yang dapat mereduksi dan menghentikan luapan emosi masyarakat ketika berhadapan dengan realitas tertentu yang tidak cocok dengan

pandangan penguasa atau kelompok dominan. Misalnya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti, demi kepentingan bersama, *mikul duwur mendem jero, jer basuki mawa bea*, demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi stabilitas nasional, dan lain sebagainya. *Keempat*, mempopulerkan konsep dan pengertian yang dapat merangkul dan menarik perhatian dan energi masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan yang telah dirancang oleh penguasa atau kelompok dominan, misalnya terdapat istilah seperti, partisipasi rakyat, kepentingan rakyat, dan lainnya.

Kelima, melakukan uniformitas bahasa atau istilah-istilah yang digunakan oleh pejabat-pejabat negara. Penekanan terhadap kesamaan bahasa, berarti penekanan kesamaan konsep dan pengertian. Cara kelima ini sering dipraktikkan pada era Orde Baru. Elite Penguasa Orde Baru dapat dikatakan sangat berhasil dalam melaksanakan uniformitas bahasa pejabat sehingga kesalahpahaman dan ketegangan dapat terminimalisir, bahkan membuat semua pejabat bisa terkontrol dengan baik. Terbukti, kekuasaan rezim pemerintahan presiden Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun lamanya. Istilah-istilah yang sering diresonansikan adalah seperti, demi kepentingan bersama, keterbukaan, Pancasila sebagai ideologi terbuka, memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat, dan seterusnya. *Keenam*, dengan cara feodalisasi Bahasa Indonesia. Bahasa nasional seharusnya dapat digunakan sebagai bahasa yang egaliter dan demokratis. Tetapi semasa Orde Baru bahkan reformasi, bahasa yang digunakan malah menunjukkan sesuatu yang feodalistik. Apabila dikomparasikan dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ketika ingin menyapa pemimpinnya, lebih menggunakan pendekatan seperti seorang sahabat, yakni dengan istilah "bung". Misalnya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan Bung Syahrir. Sedangkan era Orde Baru bahkan reformasi, penggunaan istilah "bung" menjadi hilang dan diganti dengan "bapak" kemudian diikuti dengan kata-kata yang mengindikasikan feodalisme, seperti memohon izin, memohon restu, memohon petunjuk, berkenan, dan lain-lain. Semakin feodal Bahasa Indonesia digunakan, otomatis akan memperlebar gap sosial antara masyarakat dengan penguasa. Lebarnya gap sosial tentunya akan membuat penguasa lebih bersifat elitis dan pelaksanaan untuk melakukan kontrol kekuasaan menjadi lemah.

Apa yang telah dijelaskan mengenai kajian wacana politik menjadikan asumsi politisasi terhadap konseptual politik identitas dengan tujuan memenangkan kontestasi politik atau menyudutkan lawan politik semakin logis dan terasa amat nyata. Mengulas kembali tentang konseptual politik identitas, memang penilaian positif akan selalu inheren apabila ditinjau melalui faktor geneologisnya. Namun, dalam perspektif "cara penggunaan" dapat dikatakan kontekstual, artinya bisa positif pun juga negatif. Gutmann (2009) memberikan klasifikasi pada tingkatan keadaban politik identitas dengan menawarkan tiga kategori penggunaan identitas dalam sistem demokrasi, yaitu: (1) *Good*: Politik identitas dianggap baik (*good*) atau positif apabila menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewarganegaraan (*civic*) dan mampu digunakan untuk melawan diskriminasi kelompok tanpa harus mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan menebarkan kebencian pada kelompok lain. (2) *Ugly*: Politik identitas dianggap jelek (*ugly*) atau dapat dikatakan negatif apabila digunakan untuk mempromosikan nilai yang mengutamakan kelompok sendiri, selalu mengampayekan diskriminasi, menekankan pemikiran antagonis terhadap kelompok lain, dan melegitimasi penggunaan kekerasan. Terakhir adalah (3) *Bad*: Pengklasifikasian pada taraf bad ini, berada di posisi moderat, yaitu diantara *good* and *ugly*. Politik identitas pada taraf ini adalah tidak digunakan untuk mempromosikan kesadaran publik kewarganegaraan (*civic*) yang

positif, tetapi tidak mengancam demokrasi dengan tidak mempromosikan rasa permusuhan dan melegitimasi penggunaan kekerasan antarkelompok identitas.

Berkenaan dengan penggunaan politik identitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memberikan batasan-batasan terkait dengan penggunaan politik identitas dalam kehidupan politik di Indonesia, diantaranya adalah (1) Memiliki negative prejudice terhadap kelompok identitas lain sehingga dimusuhi dengan menganggap “kalau kamu sama denganku maka kamu benar dan ketika kamu berbeda maka kamu sudah pasti salah”, (2) Memunculkan narasi dikotomis atau memojokan lawan seperti “jangan pilih dia karena dia bukan pribumi, bukan islam, dan seterusnya”, (3) Memunculkan kekerasan yang akan berimplikasi pada perpecahan bangsa, (4) Dipakai untuk mengganti ideologi Pancasila. Apabila politik identitas digunakan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dijelaskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka politik identitas kemudian bertransformasi menjadi negatif atau apabila merujuk pada teori Amy Gutmann sudah termasuk pada klasifikasi “ugly”.

Simpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meluruskan konseptual politik identitas menggunakan tiga program utamanya, yaitu Pendidikan Politik, Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Sinau Bhinneka Tunggal Ika. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meluruskan konseptual politik identitas adalah dengan cara melakukan edukasi kepada berbagai elemen masyarakat tentang konseptual politik identitas yang sebenarnya. Politik identitas versi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai instrumen atau kendaraan bagi tiap-tiap identitas seperti suku, ras, budaya, agama, daerah, gender, dan identitas lainnya guna memperjuangkan atau mendapatkan keadilan sebagai akibat dari ketidakadilan atau marginalisasi yang tengah dialami. Eksistensi politik identitas dalam khasanah kehidupan demokrasi merupakan hal yang sangat wajar. Sehingga tidak boleh dipahami secara negatif dan sempit saja, justru harus mendapatkan penilaian positif, karena secara konsep digunakan untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompok masyarakat marginal. Politik identitas kemudian dapat bertransformasi menjadi negatif bilamana digunakan untuk memunculkan narasi dikotomis, berprasangka buruk terhadap kelompok identitas lain, memunculkan kekerasan yang akan berimplikasi pada perpecahan kehidupan bangsa, dan digunakan untuk mengganti ideologi Pancasila.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan oleh peneliti, (1) apa yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan konseptual politik identitas sudah sangat baik, karena didasarkan pada teori para ahli dan sekaligus mengindikasikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terbawa arus atas pemahaman konseptual politik identitas yang keliru. Dengan demikian, harapannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta selalu konsisten dalam meluruskan konseptual politik identitas kepada seluruh elemen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap menjaga dan memegang teguh kultur akademik. Sehingga konseptual politik identitas yang disampaikan tidak mengalami distorsi konsep dan berujung pada ketidakpahaman seluruh elemen masyarakat terhadap politik identitas, (2) Pemerintah di luar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya memahami kembali konseptual politik

identitas secara komprehensif sesuai dengan teori para ahli. Agar kebijakan yang dibuat dan direalisasikan tentang politik identitas tidak mengandung ambiguitas dan akan berdampak pada keberlangsungan Pemilu tahun 2024, dan (3) Masyarakat diharapkan memahami kembali konseptual politik identitas secara komprehensif sesuai dengan teori para ahli.

Referensi

- Alfaqi, M. Z. (2016). Memahami Indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 111-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5451>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak politik identitas pada Pilpres 2019: Perspektif populisme [The impact of identity politics on president election 2019: populism perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43-63. DOI: <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Brown, G. dan Yule, G. (1996). *Analisis wacana*. (Terjemahan I. Sutikno). Jakarta: Gramedia.
- Fasold, R., (1990). *Sociolinguistics of language*, London: Basil Blackwell.
- Gutmann, A. (2009). *Identity in democracy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Heller, A. dan Punsher, S. (1995). *Biopolitical ideologies an their impact on the new social movements*. A New Handbook of Political Societies. Oxford: Blackwell
- Kauffman, L. A. (1990). *The anti-politics of identity*. *Socialist Review*, 20(1), 67-80.
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 63-75. Retrieved from <http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Jakarta: Prenada Media.
- Maarif, A. S., Maarif, A. S., Ali-Fauzi, I., & Panggabean, S. R. (2010). *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai alat komunikasi politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 445-464. DOI: <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>
- Pabottingi, M. 1991. "Komunikasi politik dalam transformasi ilmu politik". *Prisma*, No. 6 Tahun XX, 6 Juni.
- Parker, R. D. (2005). *Five theses on identity politics*. *Harv. JL & Pub. Pol'y*, 29, 53.
- Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 150-164. DOI: <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i2.537>
- Rahardjo, M. (2004). Politik bahasa dan bahasa politik (Bahasa dalam praksis politik di Indonesia). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 5(1), 83-107. DOI: <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6147>
- Rawls, J. (1973). *A theory of justice*, London: Oxford University.
- Schiffrin, D. (1994). *Approaches to discourse* (Vol. 8). Oxford: Blackwell.

Subarkah, H. R. Analisis pilihan politik tergantung pembuka agama (studi kasus: gerakan 212 di Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga pemilu presiden 2019). Selamat Datang Era Post Truth: Apa dan Bagaimana?, Universitas Negeri Malang, 1-14.

Thomas, L., & Waring, S. (1999). *Language, society and power: An Introduction* (1st ed.). Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203426968>

Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & Geovasky, I. (2021). Politik identitas dan religiusitas perdamaian berbasis Pancasila di ruang publik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 6(1), 95-126. DOI: <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>